



tetapi, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah, mawwadah, dan rahmah* ketentuan batas usia sangat diperlukan karena mengandung *maṣlahah*, sekaligus sebagai tindakan pencegahan segala dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari *Maṣlahah al-Mursalah* dan terwujudnya kepastian hukum akibat adanya perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang juga interpretas *حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ*.

## B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Bagi para orangtua tidak hanya karena tergesa-gesa semata menikahkan anaknya. Terkhusus para pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek psikologis, biologis, ekonomi, sosial dan pendidikan. Mempunyai perencanaan dan persiapan yang matang sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Selalu menjaga pergaulan dan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya.
2. Seharusnya Pemerintah (Pengadilan Agama) beserta BKKBN bersinergi dalam mengoptimalkan program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga dapat menghindari dampak negatif dari akibat perkawinan. Hendaknya menimbang kembali batas usia minimal menikah dalam UUP. No. 1 tahun 1974 dan KHI sebab pada realitanya batas minimal yang ditetapkan sudah tidak relevan seiring dengan perkembang zaman saat ini agar mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Sehingga dapat meminimalisir perceraian akibat usia dini yang semakin marak. Oleh karena itu Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya berpengaruh dalam

